

KERAGAAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN

Performance of Agricultural Extension System in Pandeglang Regency, Banten Province

Ahmad Fauzan, Kartono

*Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten
Jln. Ciptayasa Km. 01, Ciruas, Serang, Banten 42182
E-mail: fauzan_ahmad04@yahoo.com*

ABSTRACT

The forms of extension institutions in Indonesia vary in line with the government system of regional autonomy. This will certainly have impacts on the performance of extension institutions in supporting agricultural development in each region. Banten Province has eight regencies/cities with diverse forms of extension institutions. Pandeglang has an extension institution that is not fully in accordance with the mandate of Law No. 16/2006. Therefore, it needs to assess the performance of existing extension system in the region. The assessment was conducted through reference study and extracting information through information meetings. Data were analyzed descriptively. Results of the analysis showed that: 1) human resources in BKPP Pandeglang were as many as 394 extension agents with average coverage area of 258.14 ha of rice fields, 1,056 ha of dryland, two village-targets, and 14 farmer groups, 2) facilities and infrastructures owned by BKPP Pandeglang Regency consisted of pilot gardens in 16 BP3K, irrigation systems in 10 BP3K, meeting rooms in 13 BP3K, and learning tools in 11 BP3K, 3) problems and constraints in extension activities in Pandeglang Regency were limited extension tools (77%), limited agricultural machineries (10%), pests and diseases (7%), and limited production facilities (6%); and 4) technologies needed as extension materials in Pandeglang Regency are a) cultivation of food crops, horticulture, and livestock (70%), b) processing and marketing (20%), and c) methodology of extension implementation (10%). Extension human resources in Pandeglang need to be supported by enhancing the role of private extension agent and continuous improvement of extension agent competence.

Keywords: *horticulture, performance, extension system, Pandeglang Regency*

ABSTRAK

Bentuk kelembagaan penyuluhan di Indonesia beragam seiring dengan sistem pemerintahan otonomi daerah. Hal ini tentu akan berdampak terhadap kinerja kelembagaan penyuluhan dalam mendukung pembangunan pertanian di masing-masing daerah. Provinsi Banten memiliki delapan kabupaten/kota dengan bentuk kelembagaan penyuluhan yang beragam. Kabupaten Pandeglang memiliki lembaga penyuluhan yang belum sepenuhnya sesuai dengan amanat UU No. 16 tahun 2006. Hal ini perlu dilihat secara rinci tentang keragaan sistem penyuluhan yang terjadi. Kajian dilakukan melalui studi referensi dan penggalian informasi melalui temu informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) ketenagaan di BKPP Kabupaten Pandeglang sebanyak 394 orang dengan memiliki cakupan wilayah binaan rata-rata dengan luas sawah 258,14 ha, lahan darat 1.056 ha, 2 desa binaan, dan 14 kelompok tani; 2) sarana yang dimiliki BKPP Kabupaten Pandeglang terdiri dari Kebun Percontohan 16 BP3K, sistem pengairan kebun 10 BP3K, ruang pertemuan 13 BP3K, dan sarana pembelajaran 11 BP3K; 3) permasalahan dan kendala dalam kegiatan penyuluhan di Kabupaten Pandeglang adalah sarana penyuluhan 77%, keterbatasan alsintan 10%, hama penyakit 7%, dan ketersediaan sarana produksi 6%; dan 4) teknologi yang dibutuhkan sebagai materi penyuluhan di Kabupaten Pandeglang adalah a) budi daya tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan (70%); b) pengolahan dan pemasaran hasil (20%); dan c) metodologi pelaksanaan penyuluhan (10%). Ketenagaan penyuluh di Kabupaten Pandeglang perlu didukung dengan meningkatkan peran penyuluh swadaya dan peningkatan kompetensi penyuluh yang berkesinambungan.

Kata kunci: *hortikultura, keragaan, sistem penyuluhan, Kabupaten Pandeglang*

PENDAHULUAN

Kegiatan penyuluhan sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan

dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sistem penyuluhan merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui kegiatan penyuluhan.

Sistem penyuluhan dapat diartikan sebagai sistem pemberdayaan petani melalui proses pendidikan nonformal. Tujuan kegiatan ini untuk membantu petani dalam meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan, mengembangkan perubahan sikap yang lebih positif, dan membangun kemandirian dalam mengelola lahan pertaniannya sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan petani (*better farming, better bussines, dan better living*) dapat diwujudkan. Penyuluh pertanian sebagai perantara dalam proses alih teknologi dengan tugas utama memfasilitasi proses belajar, menyediakan informasi teknologi, informasi input, dan harga input-output, serta informasi pasar (BPSDMP 2003).

Sejak pemberlakuan UU tentang otonomi daerah, penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang menyangkut aspek-aspek perencanaan, kelembagaan, ketenagaan, program, manajemen, dan pembiayaan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat baik secara langsung maupun melalui pemerintah provinsi mempunyai wewenang untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat menyelenggarakan penyuluhan pertanian secara produktif, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan lokalita (BPSDMP 2003).

Kabupaten Pandeglang memiliki potensi utama di bidang pertanian. Kabupaten Pandeglang memiliki luas wilayah 274.689 ha, dengan lahan pertanian baik sawah dan nonsawah seluas 244.900 ha atau 89,16% dari luas wilayah yang dimiliki. Jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan berjumlah 406.180 ha atau sekitar 41,13% dari jumlah angkatan kerja (BPS Kabupaten Pandeglang 2014). Upaya untuk menunjang pembangunan pertanian di Kabupaten Pandeglang telah dibentuk beberapa dinas/badan yang bertugas melakukan pengelolaan dan pembangunan di bidang pertanian. Pada bidang penyuluhan pertanian telah dibentuk Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP). Dalam Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang disebutkan bahwa BKPP bertugas melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan dalam meningkatkan kapasitas petani sehingga mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Tantangan serta kendala dalam pembangunan di bidang pertanian ke depan akan semakin berat sehingga sistem penyelenggaraan penyuluhan harus semakin mantap. Pengembangan sistem informasi inovasi teknologi, peningkatan profesionalisme penyuluh lapangan untuk merespon semua perubahan yang terjadi secara cepat dan proporsional harus selalu ditingkatkan. Upaya tersebut harus didukung dengan sistem penyuluhan yang efektif dan produktif. Penyelenggaraan penyuluhan dalam mendukung pembangunan pertanian perlu dilakukan secara lintas sektoral. Kebutuhan informasi yang komprehensif, jenis, waktu, serta sasaran yang ingin dicapai berdasarkan kondisi terkini menjadi syarat dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Guna mendukung pengembangan pertanian berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Pandeglang perlu dilakukan kajian terhadap sistem penyelenggaraan penyuluhan untuk mengidentifikasi keragaan sistem penyuluhan meliputi kelembagaan, ketenagaan, kebijakan di bidang penyuluhan, permasalahan dan kendala, dan kebutuhan terhadap teknologi sebagai materi penyuluhan.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup kegiatan kajian meliputi kegiatan studi referensi, peliputan hasil diskusi dengan beberapa pelaku kegiatan penyuluhan, dan pengumpulan data primer melalui *focus group discussion* (FGD) dalam kegiatan temu informasi. Metode kajian menggunakan pendekatan deskriptif yang memusatkan perhatian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan bertitik tolak dari data yang dikumpulkan (Singarimbun 1995).

Temu informasi dilakukan pada tanggal 2 Juli 2015 di Kabupaten Pandeglang dengan peserta perwakilan dari BP3K se-Kabupaten Pandeglang. Data dikumpulkan meliputi data sekunder dari hasil studi referensi dan data primer dari hasil diskusi, serta pengamatan di lapangan. Data hasil diskusi

(FGD) diperoleh dari para koordinator BP3K se-Kabupaten Pandeglang dengan jumlah 30 orang perwakilan setiap kecamatan melalui kegiatan temu informasi.

Variabel data meliputi keragaan kelembagaan penyuluhan, yaitu ketersediaan SDM penyuluh, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan aset/kebun percontohan, ruang pertemuan, alat peraga, dan peralatan penunjang lainnya. Data dikumpulkan dan ditabulasi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mengklasifikasikan indikator-indikator pengamatan sehingga menjadi informasi yang dapat memberikan gambaran kondisi sistem penyuluhan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Pandeglang berada pada bagian barat daya Provinsi Banten dan secara geografis terletak 6°21'–7°10' LS dan 104°8'–106°11' BT. Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 274.689,91 ha atau 2.747 km² dan secara administrasi terbagi atas 35 kecamatan, 322 desa, dan 13 kelurahan.

Dataran di Kabupaten Pandeglang sebagian besar merupakan dataran rendah, yakni di daerah bagian tengah dan selatan, dengan variasi ketinggian 0–1.778 mdpl dengan luas sekitar 85,07% dari luas wilayah kabupaten. Secara umum, perbedaan ketinggian di Kabupaten Pandeglang cukup tajam, dengan titik tertinggi 1.778 mdpl yang terdapat di Puncak Gunung Karang pada daerah bagian utara dan titik terendah terletak di daerah pantai dengan ketinggian 0 mdpl. Kemiringan tanah di Kabupaten Pandeglang bervariasi 0–45%; dengan alokasi 0–15% areal pedataran sekitar Pantai Selatan dan Pantai Selat Sunda; alokasi 15–25% areal berbukit lokasi tersebar; dan alokasi 25–45% areal bergunung pada bagian tengah dan utara.

Kelembagaan Penyuluhan

Bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Pandeglang berbentuk BKPP berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang No. 34 Tahun 2014. Kegiatan penyuluhan diwadahi pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan. Hal ini belum sesuai sepenuhnya dengan amanat UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K serta Perpres No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. BKPP dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah bupati dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah.

BKPP mempunyai beberapa tugas, di antaranya 1) penyusunan perencanaan BKPP; 2) perumusan kebijakan teknis BKPP; 3) pengoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di BKPP; 4) pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan BKPP; 5) pelaksanaan kegiatan penatausahaan BKPP; 6) pelaksanaan satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi BKPP Kabupaten Pandeglang terdiri dari 1) Kepala Badan; 2) Sekretariat; 3) Bidang Ketersediaan, Kerawanan, Distribusi, dan Harga Pangan; 4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; 5) Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan; 6) UPT; dan 7) Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat BKPP membawahi 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Bidang Ketersediaan, Kerawanan, Distribusi, dan Harga Pangan membawahi 1) Subbidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan 2) Subbidang Distribusi dan Harga Pangan. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi a) Subbidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan; b) Subbidang Keamanan Pangan. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan membawahi a) Subbidang Ketenagaan dan Kelembagaan; b) Subbidang Pengkajian Teknologi dan Kemitraan.

Di tingkat kecamatan berbentuk BP3K yang mempunyai tugas, yaitu 1) menyusun program penyuluhan; 2) melaksanakan penyuluhan; 3) menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi; 4) memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan; 5) memfasilitasi peningkatan kapasitas

penyuluh; dan 6) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengkajian, dan pengembangan model.

Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, serta pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan di tingkat kecamatan. Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tingkat kecamatan dipimpin oleh pengelola balai. Pengelola Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tingkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harian bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten.

Ketenagaan

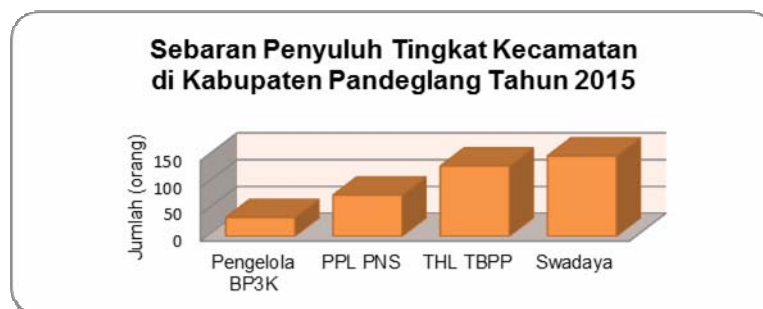
Pada tahun 2015 tenaga penyuluh pada BKPP Kabupaten Pandeglang berjumlah 394 orang dengan rincian sebagai berikut: PNS 112 orang, CPNS 1 orang, Honorer/THL TBPP 131 orang, dan swadaya 150 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah tenaga penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan berdasarkan status kepegawaian pada BKPP Pandeglang, 2015

No.	Uraian	PNS	CPNS	Honorer/ THL TBPP	Swadaya	Jumlah
1.	Penyuluh pertanian	78	1	131	80	290
2.	Penyuluh perikanan	17	-	-	35	52
3.	Penyuluh kehutanan	17	-	-	35	52
Jumlah		112	1	131	150	394

Sumber: BKPP Kabupaten Pandeglang (2015)

Penyebaran SDM di tingkat kecamatan di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: sebagai pengelola BP3K 35 orang, PPL PNS 78 orang, THL TB PP 131 orang, dan penyuluh swadaya 150 orang (Gambar 1) (BKPP Kabupaten Pandeglang 2015).



Gambar 1. Sebaran SDM di tingkat kecamatan di Kabupaten Pandeglang, 2015

Luas Wilayah Binaan

Sebaran kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Pandeglang merata di setiap kecamatan dengan membawahi beberapa desa dan wilayah binaan. Di Kabupaten Pandeglang setiap penyuluh pertanian memiliki cakupan wilayah binaan rata-rata sebagai berikut: luas sawah 258,14 ha, lahan darat 1.056 ha, 2 desa binaan, dan 14 kelompok tani.

Sarana dan Prasarana BP3K

Kepemilikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan masih belum merata dan seragam. Kepemilikan kebun percobaan hanya dimiliki oleh 16 BP3K dengan luasan mulai 100 m² sampai dengan 10.000 m². Sarana dan prasarana lain yang dimiliki adalah ketersediaan jaringan pengairan untuk lahan percontohan, ruang pembelajaran, serta sarana pembelajaran (Tabel 2).

Tabel 2. Sarana dan prasarana pada masing-masing BP3K di Kabupaten Pandeglang, 2015

No.	Fasilitas yang dimiliki BP3K	Jumlah (BP3K)	BP3K yang memiliki
1.	Kebun Percontohan	16	Panimbang, Angsana, Cigeulis, Cikedal, Cipeucang, Cibaliung, Pandeglang, Pagelaran, Sukaresmi, Mandalawangi, Sobang, Cadasari, Cimanggu, Koroncong, Cibitung, dan Banjar
2.	Sistem pengairan	10	Pulosari, Patia, Jiput, Carita, Cipeucang, Pandeglang, Pagelaran, Cimanuk, Cimanggu, dan Labuan
3.	Ruang Pertemuan	13	Panimbang, Cigeulis, Cikedal, Carita, Cipeucang, Cibaliung, Pagelaran, Cimanuk, Mandalawangi, Sobang, Cadasari, Cimanggu, dan Banjar
4.	Sarana pembelajaran	11	Panimbang, Cigeulis, Bojong, Saketi, Cipeucang, Cibaliung, Sobang, Cadasari, Koroncong, Cibitung, dan Labuan

Program Kegiatan Penyuluhan

Program kegiatan penyuluhan di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2015 mendapatkan anggaran dari APBD dan APBN. Beberapa program kegiatan yang dijalankan pada tahun 2015 pada Tabel 3.

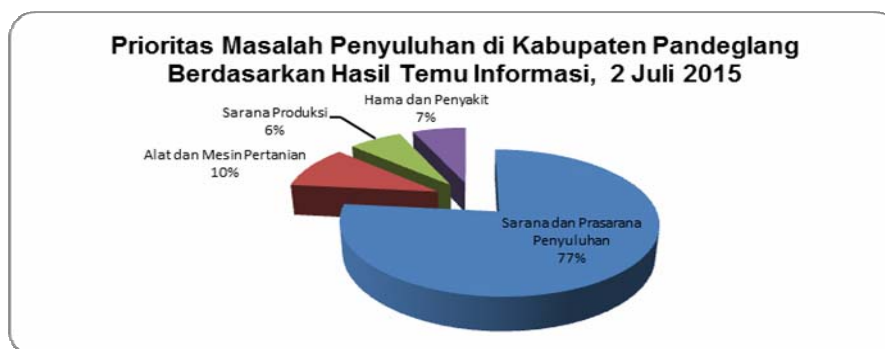
Tabel 3. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPP, 2015

No.	Program kegiatan	Asal anggaran
1.	Meningkatkan penerapan pola tanam	APBN/ APBD
2.	Peningkatan pelayanan penyuluhan	APBN/ APBD
3.	Peningkatan produksi dan populasi	APBN/ APBD
4.	Peningkatan tanam serempak dan percepatan tanam	APBN/ APBD
5.	Peningkatan kemampuan kelompok tani	APBN/ APBD

Sumber: BKPP Kabupaten Pandeglang (2015)

Permasalahan dan Kendala Kegiatan Penyuluhan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi empat aspek, yaitu 1) sarana dan prasarana penyuluhan; 2) ketersediaan alat dan mesin pertanian; 3) hama dan penyakit tanaman, dan 4) ketersediaan sarana produksi (Gambar 2).

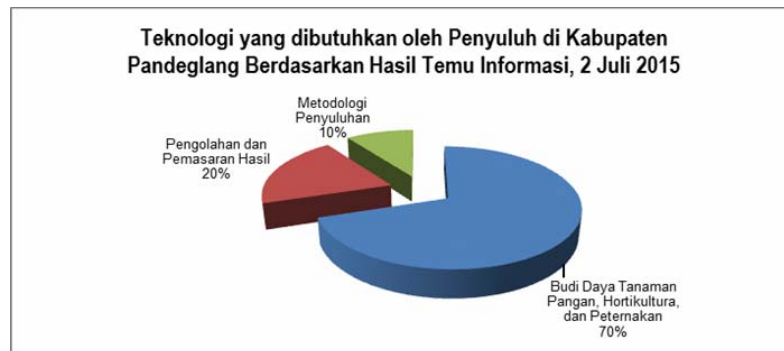


Gambar 2. Prioritas permasalahan dalam kegiatan penyuluhan di Kabupaten Pandeglang.

Kelengkapan sarana dan prasarana penyuluhan masih kurang tersedia, seperti ruang pertemuan, media pembelajaran, alat bantu penyuluhan, kendaraan operasional, dan akses terhadap sumber informasi. Ketersediaan alat dan mesin pertanian dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi pangan terutama pompa air dan sumur pantek masih kurang, terutama karena sebagian besar lahan pertanian merupakan lahan tadah hujan. Ketersediaan sarana produksi berupa benih dan pupuk sering tidak tersedia ketika diperlukan, serta serangan hama dan penyakit.

Kebutuhan Teknologi

Kebutuhan teknologi yang dapat dihimpun pada saat pertemuan Temu Informasi dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu (1) budi daya tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan; (2) pengolahan dan pemasaran hasil; dan (3) metodologi pelaksanaan penyuluhan (Gambar 3).



Gambar 3. Teknologi yang diperlukan oleh penyuluh di Kabupaten Pandeglang

KESIMPULAN DAN SARAN

Kelembagaan penyuluhan di tingkat Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya sesuai dengan UU No 16 Tahun 2006 tentang SP3K serta Perpres No. 154 Tahun 2014. Kelembagaan penyuluhan di kabupaten masih berupa lembaga campuran berbentuk Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Ketenagaan di BKPP Kabupaten Pandeglang sebanyak 394 orang dengan memiliki cakupan wilayah binaan tiap penyuluh rata-rata dengan luas sawah 258,14 ha, lahan darat 1.056 ha, 2 desa binaan, dan 14 kelompok tani. Sarana dan prasarana yang dimiliki BKPP Kabupaten Pandeglang terdiri dari Kebun Percontohan 16 BP3K, sistem pengairan kebun 10 BP3K, ruang pertemuan 13 BP3K, dan sarana pembelajaran 11 BP3K. Permasalahan dan kendala dalam kegiatan penyuluhan di Kabupaten Pandeglang adalah sarana dan prasarana penyuluhan (77%), keterbatasan alat dan mesin pertanian (10%), hama penyakit (7%), dan ketersediaan sarana produksi (6%). Teknologi yang dibutuhkan sebagai materi penyuluhan di Kabupaten Pandeglang adalah budi daya tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan (70%); pengolahan dan pemasaran hasil (20%); dan metodologi pelaksanaan penyuluhan (10%).

Ketenagaan penyuluh pertanian di Kabupaten Pandeglang perlu didukung dan ditambah dengan memberdayakan penyuluh swadaya untuk mewujudkan satu penyuluh dalam satu desa. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan masih perlu dilengkapi dan kompetensi penyuluh juga perlu ditingkatkan terkait penguasaan teknologi budi daya tanaman dan peternakan sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BKPP Kabupaten Pandeglang] Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pandeglang. 2015. Program Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Pandeglang (ID): Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pandeglang.
- [BPSDMP] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. 2003. Nasional pengembangan penyuluh pertanian. Jakarta (ID): Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- [BPS Kabupaten Pandeglang] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2014. Kabupaten Pandeglang dalam angka 2014. Pandeglang (ID): Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
- Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang Bab. VI Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan [Internet]. [diunduh 2015 Sep 6]. Tersedia dari: http://jdihukum.pandeglangkab.go.id/gbr/hukum/daerah/arsip_291.pdf.
- Singarimbun M. 1995. Metode penelitian survei. Jakarta (ID): LP3S.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan [Internet]. [diunduh 2015 Sep 6]. Tersedia dari: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=1568&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2006 UU_no_16_th_2006.